

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi
Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

OKTA SIGIT UTOMO

B 200 080 146

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : OKTA SIGIT UTOMO
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Jenis : Skripsi
Judul : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Study Empiris
di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 5 Januari 2013
Yang menyatakan



(OKTA SIGIT UTOMO)

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)**

Disusun Oleh :

OKTA SIGIT UTOMO

B 200 080 146

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 5 Januari 2013

Pembimbing Utama

(Dra. Nursiam, A.k. M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. H. Triyono S.E., M.Si)

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)**

Disusun Oleh :

OKTA SIGIT UTOMO

B 200 080 146

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

ABSTRAKSI

Penelitian ini meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan Surakarta.

Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet. Dari laporan ini diperoleh data mengenai realisasi Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah karesidenan surakarta.

Kata kunci : *pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potesi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan GNP perkapita (*Gross National Product*) atau pendapatan masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus-menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

Todaro (2003) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan PADnya. Kemandirian Pemkab atau Pemko dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemko. Semakin besar pajak daerah dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi dari 4(empat) jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang

sah. Akan tetapi dalam penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan menjabarkan dan menganalisis keefektifan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di DPPKAD Wilayah Karesidenan Surakarta)**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Karesidenan Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Karesidenan Surakarta.

B. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah

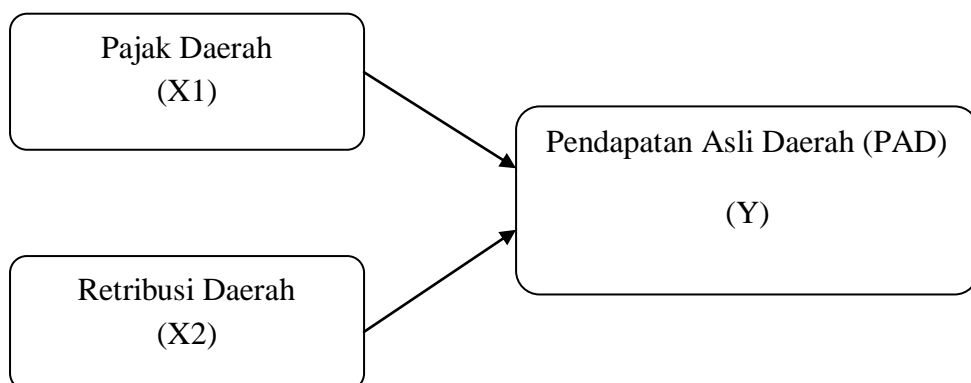
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Hipotesis

H_{A1} : Pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap PAD wilayah Karesidenan Surakarta.

H_{A2} : Retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap PAD wilayah Karesidenan Surakarta.

Kerangka Penelitian



C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data time series yaitu sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan

secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Data penelitian bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id) melalui internet.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD wilayah Karesidenan Surakarta yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di kabupaten/kota wilayah Karesidenan Surakarta.

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, melalui teknik ini pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dari penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 Pemerintahan Daerah yaitu : Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

Metode Analisa Data

Metode regresi berganda menghitung satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan persamaan sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \varepsilon$$

D. Hasil Penelitian

Hasil pengolahan data dengan bantuan computer program spss versi 11.0 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

Uji Hipotesis

Dari hasil pengolahan statistik diperoleh hasil sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.410E10	2.559E9		9.418	.000
pd	.917	.107	.610	8.564	.000
Rd	.818	.118	.493	6.923	.000

Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.7 di atas diperoleh hasil bahwa kedua yang variabel independent yaitu pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena keduanya mempunyai nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($p < 0,05$).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nilawati dan Rika Lidyah (2003) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_{A1} .
2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga menolak H_0 dan menerima H_{A2} .

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari Karesidenan Surakarta menjadi Provinsi Jawa tengah atau salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan menambah periode pengamatan.
2. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.
3. bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pemerintah daerah wilayah Karesidenan Surakarta untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apituley, Margaretha Rosalyn dan Josepus Makita. (2009). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*, Volume III, Nomer 1, Maret 2009.
- Arsyad, Lincolin. (1992). *Ekonomi Pembangunan*, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba 4, Jakarta.
- Juri, H. Mat. (2012). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda*. JURNAL EKIS Vol. 8 No. 1, Maret 2012.
- Listiani, Titik. (2008). *Analisis Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang*. ACCOUNTING, 2008.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi 2002*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mujiyati dan M Abdul Aris. (2009). *Perpajakan Konteporer*, Muhammadiyah University Press.
- Nilawati, Uni dan Rika Lidyah. (2003). *Pengaruh Realisasi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fordema Volume 3 Nomor 2, November 3003
- Nurmayani, (2008). *Fungsi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol XI No. 1, Juni 2008.

- Rogers, E. M. (1983). *Modernization Among Peasant. The Impact Of Communication*. New York. Holt, Rinehart, and Wiston
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan "Teori dan Aplikasi"*, PT Grasindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Amri. (2010). *Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara*, 2010.
- Sumiyanto, Eko. (2009). *Analisis Potensi Retribusi Terminal Penumpang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2001 – 2007*. UII YOGYAKARTA, 2009.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supardi. (2008). *Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul*, AKMENIKA UPY, Volume 2, 2008.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesi. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesi. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*.

Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

[Http://WWW.djpk.depkeu.go.id](http://WWW.djpk.depkeu.go.id)